



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
SUB UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIANSYAH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 457681

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 795.300.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 473 m2/400 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 447.300.000
2. Tanah Seluas 1178 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 144.000.000
3. Tanah Seluas 900 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 108.000.000
4. Tanah Seluas 600 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000
5. Tanah Seluas 590 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 187.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU SIGRA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA V1J02032L0 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 39.000.000**

D. SURAT BERTAGIH **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 12.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**



Sub Total	Rp.	1.033.300.000
III. HUTANG	Rp.	150.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	883.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **19 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.